

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dinamika perkembangan organisasi pemerintahan di era kontemporer saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kompleksitas ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, melainkan juga menyentuh dimensi etika dan profesionalisme aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat, sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran strategis dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga, dituntut untuk menerapkan standar etika bisnis yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Persoalan etika dalam birokrasi pemerintahan merupakan isu fundamental yang senantiasa menjadi fokus perhatian berbagai pemangku kepentingan. Degradasi moral aparatur negara yang ditandai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada efektivitas kinerja organisasi, tetapi juga mengancam legitimasi pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memperbaiki sistem etika menjadi suatu keharusan dalam rangka membangun kultur organisasi yang berintegritas.

BKKBN Provinsi Sumatera Barat memiliki peran vital dalam implementasi program-program kependudukan dan keluarga berencana yang langsung menyentuh masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, BKKBN dituntut untuk mentransformasikan

diri menjadi organisasi yang tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan juga mampu menjadi teladan dalam penerapan etika kerja yang tinggi. Kompleksitas tugas dan tanggung jawab pegawai tata usaha dalam mendukung fungsi BKKBN membutuhkan pendekatan komprehensif yang memadukan aspek profesionalisme, integritas, dan kompetensi.

Kajian empiris menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis memiliki korelasi signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. Berbagai penelitian terdahulu telah mengonfirmasi bahwa organisasi yang menginternalisasi nilai-nilai etika secara konsisten cenderung memiliki produktivitas lebih tinggi, tingkat konflik internal lebih rendah, dan kemampuan adaptasi yang lebih baik. Dalam konteks BKKBN Provinsi Sumatera Barat, hal ini berarti bahwa penerapan etika bisnis tidak hanya sekadar memenuhi aspek normatif, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.

Kompleksitas tantangan etika dalam birokrasi pemerintahan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial atau superfisial. Dibutuhkan suatu model pendekatan yang komprehensif yang mampu mengintegrasikan aspek struktural, kultural, dan individual. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, transparan, dan akuntabel di lingkungan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

Perspektif teoritis dalam manajemen sumber daya manusia modern menempatkan etika sebagai komponen integral dalam pengembangan kapasitas organisasional. Teori-teori kontemporer seperti etika consequentialism, deontologi, dan virtue ethics menawarkan kerangka konseptual untuk memahami kompleksitas perilaku etis dalam organisasi. Dalam konteks BKKBN Provinsi Sumatera Barat, implementasi etika bisnis

tidak cukup hanya dengan mengandalkan regulasi formal, tetapi membutuhkan internalisasi nilai-nilai etika yang mendalam pada setiap individu pegawai.

Penelitian ini berupaya mengeksplorasi secara mendalam mekanisme penerapan etika bisnis dalam meningkatkan efektivitas kinerja pegawai tata usaha di BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi etika, menganalisis hambatan yang dihadapi, serta bagaimana strategi pengembangan model etika bisnis. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model etika bisnis yang adaptif dan transformatif.

Signifikansi penelitian ini terletak pada potensinya untuk memberikan kontribusi nyata dalam reformasi birokrasi pemerintahan daerah, khususnya di BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Dengan mengungkap praktik-praktik etis yang efektif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merancang intervensi strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk membahas tugas akhir yang berjudul "Penerapan Etika Bisnis dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pegawai Tata Usaha Kantor BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki mandat penting dalam mengelola isu-isu kependudukan serta mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas. Sejak didirikan pada tahun 1970, BKKBN telah bertransformasi dari lembaga yang semula berfokus pada program Keluarga Berencana (KB), menjadi lembaga yang menjalankan

fungsi strategis dalam pembangunan nasional melalui pendekatan pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, serta edukasi kesehatan reproduksi dan remaja.

BKKBN hadir secara struktural mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, termasuk melalui Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi di setiap wilayah Indonesia. Keberadaan BKKBN Provinsi Sumatera Barat memiliki arti penting dalam menyukseskan program-program nasional seperti Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), program Generasi Berencana (Genre), serta penurunan angka stunting. Tugas BKKBN tidak hanya bersifat teknis, namun juga administratif, yang membutuhkan dukungan tata usaha yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam lingkungan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, bagian Tata Usaha merupakan komponen vital yang memastikan kelancaran operasional lembaga, mulai dari pengelolaan dokumen dan surat-menyurat, pengarsipan, layanan kepegawaian, pengelolaan logistik, hingga dukungan teknis administratif lainnya. Pelaksanaan tugas-tugas ini tidak terlepas dari pentingnya penerapan nilai-nilai etika kerja dan etika bisnis sebagai landasan dalam membentuk perilaku profesional, integritas pegawai, serta kualitas pelayanan publik.

Etika bisnis dalam lingkungan pemerintahan, termasuk di BKKBN, bukan hanya berkaitan dengan hubungan eksternal atau transaksi bisnis, tetapi juga menyangkut perilaku individu dan organisasi dalam menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi nilai moral, tanggung jawab, kejujuran, dan transparansi. Etika bisnis menjadi kunci dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, meningkatkan kedisiplinan pegawai, serta mencegah terjadinya penyimpangan administratif dan penyalahgunaan wewenang.

Tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga publik semakin menegaskan bahwa penerapan etika bisnis bukanlah sekadar pilihan, melainkan keharusan. Dalam konteks BKKBN, di mana keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kinerja pegawai, penerapan etika bisnis yang konsisten diyakini mampu mendorong peningkatan efektivitas kinerja, khususnya di bagian Tata Usaha yang menjadi fondasi administratif organisasi.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan etika bisnis dapat meningkatkan efektivitas kinerja pegawai Tata Usaha di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola organisasi serta menjadi acuan dalam perbaikan budaya kerja yang profesional dan etis di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Salah satu elemen penting dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan BKKBN adalah unit Tata Usaha, yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dokumen, surat-menyurat, arsip, kepegawaian, logistik, hingga layanan pendukung operasional. Pegawai Tata Usaha dituntut untuk mampu menjalankan tugasnya dengan cermat, terorganisir, dan sesuai prosedur, mengingat mereka merupakan penghubung antara unit pelaksana teknis dengan manajemen organisasi.

Dengan banyaknya beban kerja administratif yang bersifat harian, pekerjaan Tata Usaha di BKKBN tidak hanya menuntut kompetensi teknis, tetapi juga etika kerja dan profesionalisme. Pegawai dituntut untuk disiplin, jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan administrasi yang dilakukan. Ketika pekerjaan dilakukan tanpa didasari oleh etika yang baik, maka akan terjadi ketidaktertiban administratif,

keterlambatan layanan, bahkan penyimpangan prosedur yang berdampak langsung terhadap efektivitas lembaga secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai etika bisnis diterapkan dalam aktivitas kerja pegawai, khususnya di bagian Tata Usaha, dan bagaimana hal itu mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran nyata mengenai penerapan etika bisnis dalam mendukung pekerjaan administrasi dan layanan internal di lingkungan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

Etika bisnis merupakan seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam perilaku kerja, baik pada tingkat individu maupun organisasi. Dalam konteks organisasi pemerintahan, etika bisnis menjadi unsur esensial dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Etika tidak hanya berbicara mengenai apa yang benar atau salah dalam teori, tetapi juga menyangkut bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara nyata dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, dan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola berbagai program strategis nasional yang berkaitan dengan isu kependudukan dan pembangunan keluarga. Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi edukasi dan advokasi kepada masyarakat, tetapi juga melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program-program pemerintah yang menyentuh langsung aspek kehidupan keluarga Indonesia, seperti keluarga berencana, pengembangan ketahanan remaja, pembangunan keluarga sehat, dan penurunan angka kekerdilan anak.

Sebagai lembaga yang bersifat pelayanan publik dan administratif, keberadaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sangat bergantung pada kinerja aparatur sipil negara yang menjalankan fungsinya. Dalam hal ini, setiap pegawai dituntut untuk menjalankan tugas secara profesional, taat prosedur, dan menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Namun demikian, profesionalisme kerja tidak akan dapat terwujud sepenuhnya tanpa adanya landasan etika yang kuat. Etika bisnis memberikan batasan sekaligus arah yang jelas bagi pegawai dalam bersikap dan bertindak, terutama dalam menghadapi dilema, konflik kepentingan, atau tekanan birokrasi.

Penerapan etika bisnis di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sangat penting karena menyangkut integritas lembaga secara keseluruhan. Banyaknya tugas administratif yang dilakukan setiap hari—mulai dari pengarsipan, pencatatan, pelayanan internal, hingga komunikasi dengan instansi lain—berpotensi menimbulkan penyimpangan prosedur jika tidak didasari oleh etika yang kuat. Pegawai yang tidak memiliki pemahaman etika bisnis yang baik cenderung bekerja secara mekanis, berorientasi pada kepentingan pribadi, dan abai terhadap nilai-nilai moral yang seharusnya dijaga oleh aparatur negara.

Sebaliknya, ketika nilai-nilai etika bisnis seperti kejujuran, akuntabilitas, integritas, dan tanggung jawab diterapkan secara konsisten dalam lingkungan kerja, maka akan terbentuk budaya organisasi yang sehat. Etika bisnis menciptakan atmosfer kerja yang kondusif, memperlakukan kerja sama tim, meningkatkan disiplin kerja, serta memperkuat hubungan antara lembaga dan masyarakat. Etika juga berfungsi sebagai kontrol sosial dan moral yang menjaga agar setiap tindakan pegawai tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik.

Selain itu, pentingnya etika bisnis di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga berkaitan dengan upaya reformasi birokrasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi adalah terciptanya aparatur sipil negara yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam hal ini, penerapan etika bisnis menjadi instrumen penting dalam membentuk karakter pegawai yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga bermoral tinggi dan berkomitmen pada tugas-tugas kenegaraan.

Lebih jauh lagi, penerapan etika bisnis yang baik memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai. Pegawai yang bekerja dengan etika akan lebih fokus pada tujuan organisasi, lebih peka terhadap tanggung jawab sosial, dan lebih mampu menjalin komunikasi yang baik antarunit. Hal ini akan berdampak positif pada pencapaian target kerja, kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian terhadap implementasi etika bisnis dalam lingkungan kerja organisasi pemerintahan, khususnya di unit-unit yang memiliki peran administratif seperti bagian Tata Usaha di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat. Kajian ini menjadi relevan mengingat tata usaha merupakan ujung tombak dalam mendukung kelancaran operasional kantor, mulai dari manajemen dokumen, pengelolaan surat-menyurat, penyusunan laporan, hingga pelayanan internal antarunit kerja. Dengan demikian, penelitian mengenai penerapan etika bisnis di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang

bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada judul tugas akhir ini, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi etika bisnis yang di terapkan oleh pegawai tata usaha BKKBN Sumatera Barat?
2. Faktor faktor apa sajakah yang memperngaruhi efektivits penerapan etika bisnis dalam meningkatkan kinerja pegawai tata usaha di lingkungan BKKBN Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana strategi pengembangan model etika bisnis yang dapat meningkatkan efektifitas kinerja pegawai tata usaha BKKBN Provinsi Sumatera Barat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini agar peneliti dapat mengetahui:

1. Agar dapat mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis yang di terapkan oleh pegawai tata usaha BKKBN Provinsi Sumatera Barat.
2. Agar dapat mengetahui faktor faktor apa sajakah yang memperngaruhi efektivits penerapan etika bisnis dalam meningkatkan kinerja pegawai tata usaha di lingkungan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.
3. Agar dapat mengetahui bagaimana strategi pengembangan model etika bisnis yang dapat meningkatkan efektifitas kinerja pegawai tata usaha BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi Penulis, Instansi, Universitas adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Penulis

1. Mengembangkan pemahaman mendalam tentang implementasi etika bisnis. dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di lingkungan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatkan kemampuan analitis dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja pegawai.
3. Memperoleh pengalaman praktis dalam melakukan penelitian di bidang manajemen sumber daya manusia sektor publik.
4. Mengasah keterampilan dalam merancang strategi pengembangan model etika bisnis yang aplikatif.
5. Memperluas jejaring profesional dengan para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan daerah.
6. Meningkatkan kompetensi dalam menganalisis permasalahan organisasi dan merumuskan solusi strategis.
7. Memperoleh wawasan praktis tentang dinamika pengelolaan sumber daya manusia di lembaga legislatif daerah.

### b. Manfaat bagi Universitas:

1. Memperkaya khazanah penelitian dalam bidang etika bisnis dan manajemen kinerja sektor public.

2. Memperkuat hubungan kemitraan antara institusi akademik dengan lembaga pemerintahan daerah.
3. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan model etika bisnis yang dapat diaplikasikan di sektor public.
4. Meningkatkan reputasi universitas sebagai lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Menyediakan referensi akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang manajemen pemerintahan daerah.
6. Memperkuat posisi universitas sebagai pusat pengembangan inovasi dalam bidang manajemen sektor public.
7. Membangun database penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran.

**c. Manfaat bagi instansi**

1. Memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi etika bisnis yang sedang berjalan di lingkungan tata usaha BKKBN Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat dijadikan dasar evaluasi dan perbaikan.
2. Membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kinerja pegawai tata usaha, sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat sasaran.
3. Menyediakan rekomendasi strategis untuk pengembangan model etika bisnis yang dapat meningkatkan profesionalisme dan produktivitas pegawai tata usaha.

4. Mendukung upaya reformasi birokrasi dengan memberikan landasan ilmiah untuk perbaikan sistem tata kelola dan budaya kerja di lingkungan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.
5. Membantu meningkatkan citra institusi melalui penguatan praktik etika bisnis yang dapat berdampak pada peningkatan kepercayaan public.
6. Memberikan masukan untuk pengembangan program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai yang berbasis pada prinsip-prinsip etika bisnis.
7. Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih kondusif dan profesional melalui penerapan standar etika yang jelas.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam tentang implementasi etika bisnis dan pengaruhnya terhadap efektivitas kinerja pegawai tata usaha di BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

### **2. Teknik Pengumpulan Data:**

1. Wawancara mendalam dengan 10 pegawai tata usaha dan 5 pimpinan di BKKBN Provinsi Sumatera Barat menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur.
2. Observasi partisipatif selama 4 minggu untuk mengamati praktik kerja harian.
3. Analisis dokumen internal terkait kebijakan etika dan laporan kinerja pegawai

## **Teknik Observasi :**

Metode observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara sistematis dengan mengamati bagaimana proses yang terjadi, dan bertujuan untuk memahami berbagai jenis informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### **1.6. Tempat dan Waktu Magang**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Yang dilaksanakan selama 2 bulan [40] hari kerja.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memperoleh hasil dari laporan ini, maka penulis menyusun sistematika Laporan Tugas Akhir dalam lima bab yang akan di uraikan sebagai berikut:

#### **BAB I PANDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode peneltian, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan etika bisnis, efektivitas kinerja, konsep pelayanan publik, dan pengelolaan tata usaha pemerintahan.

#### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari BKKBN Provinsi

Sumatera Barat, yang berisikan tentang sejarah kantor BKKBN Provinsi Sumatera Barat, bisnis, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta penjelasan mengenai bagian Tata Usaha BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

#### BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran hasil atau data yang di dapat penulis selama magang.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil laporan magang serta saran yang diberikan sebagai masukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan.

